




	NOMOR SOP	108/SOP/2300/04/2021
	TGL. PEMBUATAN	03 Juli 2020
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	16 April 2021
<p>KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL</p> <p>MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA</p> <p>BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA DALAM NEGERI</p>	NAMA SOP	Pengujian tentang Konsekuensi
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor __ Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Peraturan Menteri Negara PANRB Nomor 15 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 7. Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Daftar Informasi Publik MK 2. Memiliki kemampuan analisis 3. Memiliki orientasi pada pelayanan publik yang efektif dan efisien



<p>Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi</p> <p>8. Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi</p> <p>9. Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan kelengkapannya 2. Daftar Informasi Publik
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Apabila kegiatan ini tidak terlaksana dengan baik, pelayanan bidang kehumasan lembaga dapat terganggu.</p>	<p>Disimpan sebagai data digital.</p>



SOP: Pengujian tentang Konsekuensi

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Unit Kerja Terkait	PPID	Kelengkapan	Waktu (240 Menit)	Output	
1	Melaksanakan koordinasi pengujian konsekuensi dengan unit kerja penguasa informasi			Konsep nota dinas koordinasi pengujian konsekuensi	30	Nota dinas koordinasi pengujian konsekuensi	
2	Melaksanakan pengujian konsekuensi informasi publik yang dikuasai			Daftar Informasi Publik	30	Pengujian konsekuensi	Unit-Unit Kerja Penguasa Informasi
3	Menyerahkan hasil pengujian konsekuensi informasi publik			Hasil pengujian konsekuensi informasi publik	60	Hasil pengujian konsekuensi informasi publik	termasuk informasi yang dikecualikan atau bukan termasuk informasi yang dikecualikan
4	Melakukan review hasil pengujian konsekuensi dan menyusun konsep Penetapan Informasi yang Dikecualikan			Hasil pengujian konsekuensi informasi publik	60	Hasil review pengujian konsekuensi	
5	Menetapkan Informasi yang Dikecualikan			Hasil Review Pengujian Konsekuensi	60	Penetapan Informasi yang Dikecualikan	

